

**MODEL MATA KULIAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM
MENGHASILKAN KOMPETENSI LULUSAN SEBAGAI
ADMINISTRATOR ANDAL DI BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Siti Hajar¹, Kholilul Kholik²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²Universitas Pembangunan Pancabudi

E-mail: ¹ sitihajar@umsu.ac.id

² kholilulkholik@dosen.pancabudi.ac.id

RINGKASAN - Salah satu kompetensi lulusan yang ingin dicapai Program Studi Ilmu Administrasi Negara adalah sebagai administrator yang andal di bidang perencanaan pembangunan. Harapan ini ingin diwujudkan sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan peluang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) khususnya di bidang perencanaan pembangunan. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kompetensi lulusan, khususnya di mata kuliah administrasi pembangunan, yang merupakan mata kuliah inti di Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU. Karena lulusan Prodi IAN juga diharapkan mampu untuk menganalisis secara kritis terhadap pendekatan dan strategi pembangunan dan kebijakan publik serta menguasai teknik perencanaan, implementasi serta evaluasi program-program pembangunan dan kebijakan publik. Kompetensi yang diharapkan ini belum bisa terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan bahwa minimnya lulusan Prodi IAN yang terlibat langsung dalam merancang dan menyusun rencana pembangunan dan pengambil keputusan atau kebijakan yang terkait dengan program pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model mata kuliah Administrasi Pembangunan yang tepat untuk Program Studi Ilmu Administrasi Negara dalam menghasilkan kompetensi lulusan sebagai administrator yang andal di bidang perencanaan pembangunan. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa untuk menghasilkan kompetensi lulusan sebagai administrator andal harus menggunakan model yang pas sehingga kompetensi lulusan yang dihasilkan sudah siap kerja dan matang dalam dunia kerja. Melalui penelitian telah lahir model baru dalam pengembangan kompetensi lulusan khususnya di mata kuliah administrasi pembangunan. Model yang dihasilkan juga akan mengarah pada pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan yaitu berpedoman kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI. Model baru ini yang dihasilkan dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan khususnya Ilmu Administrasi Negara untuk dapat berdaya saing dan siap kerja di era MEA.

Kata Kunci : Kompetensi Lulusan, Administrator dan Perencanaan Pembangunan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai konsekuensi dari berlakunya kesepakatan internasional. Persoalan yang sangat mendasar yang harus dihadapi Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 adalah tenaga kerja yang didominasi oleh tenaga kerja yang tak terdidik sehingga produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan jumlah pengangguran di Indonesia merupakan jumlah tertinggi dari 10 negara anggota ASEAN, serta kurangnya tenaga kerja yang terampil dalam menghadapi MEA 2015. Untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, maka kualitas lulusan di dunia pendidikan harus ditingkatkan, dan mewujudkan sistem dan mutu pendidikan yang baik sehingga tercipta tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan kemampuan di bidang tertentu. Dengan adanya mutu pendidikan yang baik diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada lulusan atau SDM sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja yang berkualitas.

Upaya yang dilakukan untuk menghasilkan lulusan atau SDM yang berkualitas yang handal di bidang perencanaan pembangunan, maka Program Studi Ilmu Administrasi Negara (Prodi IAN) melaksanakan pengembangan kurikulum sehingga menghasilkan kompetensi lulusan yang dapat mewujudkan SDM yang andal. Kompetensi lulusan yang diharapkan dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara, salah satunya adalah mampu menganalisis secara kritis proses perencanaan, implementasi dan evaluasi program pembangunan serta kebijakan publik yang dituangkan dalam rincian Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2011.

Kompetensi yang diharapkan ini belum bisa terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan bahwa minimnya lulusan Prodi IAN yang terlibat langsung dalam merancang dan menyusun rencana pembangunan dan pengambil keputusan atau kebijakan yang terkait dengan program pemerintah. Sesuai dengan data Borang Akreditasi Prodi IAN (2014:24), bahwa 70% lulusan Prodi IAN bekerja di instansi pemerintah, namun hanya sekitar 20% yang ikut serta dalam pembuatan kebijakan dan penyusunan rancangan pembangunan. Hal ini

berkaitan dengan keahlian lulusan untuk menjadi seorang administrator yang handal belum dikuasai penuh di bidang perencanaan pembangunan sehingga para lulusan tidak mempunyai rasa percaya diri untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Lulusan Prodi IAN juga diharapkan mampu untuk menganalisis secara kritis terhadap pendekatan dan strategi pembangunan dan kebijakan publik serta menguasai teknik perencanaan, implementasi serta evaluasi program-program pembangunan dan kebijakan publik. Kemampuan lulusan untuk melakukan analisis terhadap setiap program pembangunan masih rendah karena para lulusan diwaktu menjadi mahasiswa minim diikuti sertakan dalam setiap kegiatan penelitian dosen yang bergerak di bidang program pembangunan. Kenyataan ini, bukan hanya mahasiswa saja yang dapat dipersalahkan namun, juga kepada tim pengajar (dosen) yang tidak melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Padahal dengan keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk lebih kritis memahami setiap pelaksanaan program pembangunan.

Mata kuliah Administrasi Pembangunan memiliki 3 SKS, berorientasi terhadap peran Administrasi Negara dalam kebijakan dan strategi pembangunan administrasi, serta dapat menganalisis peranan Administrasi Negara dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan program-program pembangunan, serta strategi dan kebijakan pembangunan administrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan di negara berkembang termasuk Indonesia. (SK. Ketua Asosiasi Ilmu Administrasi Negara/Publik Indonesia)

Kompetensi ini diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Majid dan Andayani (2008) menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka mahasiswa harus dibiasakan untuk selalu berpikir dan bertindak dalam perencanaan pembangunan sehingga mahasiswa tersebut dapat berkompeten dalam bidang tersebut.

Dengan demikian, untuk menghasilkan kompetensi lulusan sebagai administrator yang handal di bidang perencanaan pembangunan, maka dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dapat mengembangkan mata kuliah Administrasi Pembangunan sehingga menghasilkan lulusan yang diharapkan oleh Prodi IAN. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik pengembangan model mata kuliah Administrasi Pembangunan Program Studi Ilmu Administrasi Negara untuk menghasilkan kompetensi lulusan sebagai administrator yang handal di bidang perencanaan pembangunan.

KAJIAN TEORI

1. Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*)

Kompetensi yang diharapkan juga telah dirumuskan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2011 yaitu peningkatan kemampuan pengetahuan dalam berpikir dan bertindak bahwa mahasiswa harus mampu menganalisis secara kritis dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi program pembangunan dan kebijakan publik, menganalisis secara kritis proses perumusan, implementasi dan evaluasi dari administrasi pembangunan dan kebijakan publik, menganalisis secara kritis sistem administrasi, pelayanan dan manajemen dalam penanganan di bidang administrasi pembangunan dan kebijakan publik, serta mampu menganalisis secara kritis terhadap pendekatan dan strategi pembangunan serta kebijakan publik.

Direktorat Akademik dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2008) mengemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dapat menumbuhkan tanggung jawab, dan partisipasi peserta didik untuk belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan umum (*public policy*), serta memberanikan diri berperan serta dalam berbagai kegiatan, baik di sekolah/universitas maupun di masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 35 ayat 1, kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standart nasional yang telah disepakati. Sedangkan menurut Widjajanti (2011) bahwa kompetensi juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan *skill* (keterampilan) dan kemampuan yang sesuai kebutuhan. Pengembangan *skill* dan pendidikan sumber daya manusia lokal juga harus dilakukan. Untuk dapat menyesuaikan kemampuan di era ini, masyarakat harus dapat melakukan perubahan yang lebih kompetitif dengan melakukan peningkatan pendidikan dan keterampilannya untuk menjadi masyarakat yang tajam dalam menangkap peluang yang berorientasi pada masa depan.

Dengan demikian, dibutuhkan suatu pengembangan dalam mata kuliah Administrasi Pembangunan, yang berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Pasal 1 Butir 1, menjelaskan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Sedangkan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI (2011), menjelaskan bahwa KKNI perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.

Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada capaian kompetensi berubah menjadi capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Melalui KKNI diharapkan dapat merubah cara pandang seseorang, yaitu tidak lagi semata ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI (2011) menjelaskan bahwa capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang

ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) juga menjelaskan bahwa capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.

KKNI memiliki 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 bahwa jenjang KKNI terdiri atas:

- a. Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator.
- b. Jenjang 4 sampai jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis.
- c. Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 5 Butir f menjelaskan bahwa lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6. Dengan demikian, Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S-1) termasuk di dalam jenjang 6, adapun deskripsi kualifikasinya adalah:

- 1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- 2) Menguasai konsep teknis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- 3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- 4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

2. Kompetensi Lulusan Sebagai Administrator yang Handal di Bidang Perencanaan Pembangunan

Kegagalan pelaksanaan pembangunan tak terlepas dari kurang atau minimnya perencanaan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk membuat perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan seorang administrator yang dapat menentukan dan memilih berbagai alternatif dalam penyusunan dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan tersebut. Fungsi dan tugas administrator ini terkait dalam menyusun langkah-langkah untuk memastikan pencapaian tujuan (hal yang ingin dicapai) yang merupakan bagian dari perencanaan dan membuat suatu prediksi (perkiraan) mengenai hal-hal yang patut diduga bisa menghambat proses gerak, dan hal ini berarti bahwa perencanaan merupakan bagian dari suatu tindakan antisipasi atas masa depan.

Administrator dalam ilmu administrasi negara disebut juga administrator publik. Administrator ini bekerja semata-mata hanya untuk kepentingan publik karena dia mempunyai peranan dan kewajiban publik. Administrasi publik dimaksudkan juga seseorang yang mempunyai kepekaan dan selalu berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Islamy, (2004) mengemukakan bahwa administrator publik terbagi tiga, yaitu:

- a. Administrator publik sebagai birokrat yang mempunyai karakteristik sebagai pelaksana kebijakan yang telah dirumuskan superior politiknya (atasan sebagai perumusan kebijakan). Dengan demikian, ia tidak memiliki peran politik, tetapi semata-mata peran instrumental (pelaksana) yang mempunyai tanggung jawab administratif).
- b. Administrator publik sebagai pemain politik yang mempunyai karakteristik berusaha bekerja untuk merumuskan kepentingan publik atas dasar nilai-nilai kemanusiaan dan selalu memperhatikan orang tidak punya, ia terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan dalam memainkan peran politiknya yang selalu disemangati oleh kepentingan publik.
- c. Administrator publik sebagai profesional, mempunyai kecakapan teknis (sebagai spesialis) dalam menjalankan tugas-tugasnya dan selalu berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik pada publiknya. Ia berfungsi dan berposisi pada perumusan kebijakan dan perancang program pembangunan. Perannya merupakan cerminan administrator publik yang

benar-benar berfungsi sebagai abdi masyarakat dalam melayani masyarakat yang berdasarkan etika profesionalnya.

Peranan terbesar seorang administrator berhubungan erat dengan kesuksesan pembangunan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat sangat bergantung kepada siapa yang menentukannya, bagaimana proses penentuannya, siapa yang dapat mempengaruhinya serta bagaimana mengimplementasikannya. (Hidayat DKK, 2002:74)

Menurut Sjafrizal (2014: 24) bahwa perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Arthur W. Lewis dalam Sjafrizal (2014: 24) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Langkah-langkah yang harus dikuasai seorang administrator di bidang perencanaan pembangunan adalah

- 1) Tahap penyelidikan
- 2) Tahap perumusan masalah
- 3) Tahap identifikasi daya dukung
- 4) Tahap rumusan tujuan
- 5) Tahap langkah-langkah (rencana kerja)
- 6) Tahap penentuan anggaran

Tahap-tahap ini dilakukan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat melakukan evaluasi. (Abe, 2005:77)

Mata kuliah administrasi pembangunan ini, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya yaitu bidang perencanaan pembangunan. Kompetensi lulusan di bidang perencanaan pembangunan secara umum harus dapat menjawab kebutuhan perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam dunia kerja atau di masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, maka mahasiswa harus memiliki keterampilan dalam bidang perencanaan pembangunan, yaitu:

- a) *Technical skills* adalah keterampilan perencana dalam melakukan proses penyusunan perencanaan pembangunan, dimulai dari;
 1. Pemahaman konteks dan kondisi kekinian.
 2. Pengusulan dan konfirmasi atas tujuan perencanaan pembangunan daerah.
 3. Identifikasi strategi,
 4. Penerapan strategi dan mekanisme implementasi,
 5. Monitoring dan evaluasi serta konfirmasi atas keberhasilan penerapan.
- b) *Planning system and process skills*, merupakan kemampuan untuk memahami prosedur dalam perencanaan yang meliputi kemampuan untuk menjalankan proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah secara efektif, kemampuan untuk bekerja dengan komunitas.
- c) *Place skills*, kemampuan untuk memahami bagaimana tempat atau kondisi bekerja dan apa yang dipikirkan dan diharapkan orang tentang kondisi tersebut.
- d) *Customer skills*, kemampuan terkait dengan kegiatan dalam sektor publik untuk memenuhi keinginan konsumen terutama dalam pelayanan publik.
- e) *Personal skills*, kemampuan individual perencana untuk memimpin dan mempresentasikan dirinya, terutama dalam interaksi langsung dan juga kemampuan komunikasi.
- f) *Organizational, managerial and political context skills*, kemampuan untuk memahami sumber daya, program dan prosedur dalam perencanaan serta kemampuan untuk memahami proses pengambilan keputusan baik dari pihak legislatif (politik) dan maupun politik dalam arti distribusi dan alokasi sumber daya.
- g) *Synoptic and integrative skills*, yaitu kemampuan melihat perencanaan secara integratif. (Kitchen, 2007)

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Maleong (2007: 3), penelitian deskriptif kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sugiyono (2010) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembangan model mata kuliah administrasi pembangunan sangatlah penting karena terkait untuk menghasilkan kompetensi lulusan sebagai administrator yang andal di bidang perencanaan pembangunan. Upaya yang dilakukan untuk mendukung pengembangan model tersebut maka dilakukan penelitian dengan cara melakukan penyebaran angket dan wawancara kepada para narasumber yang berasal dari mahasiswa, dosen *stakeholder* Program Studi Ilmu Administrasi Negara, yakni alumni dan pengguna lulusan serta pengurus IAPA. Untuk mendukung hasil penelitian ini juga dilakukan diskusi melalui *Focus Grup Discussion* (FGD) yang bertujuan untuk memperkuat hasil analisis kualitatif.

Memahami mata kuliah administrasi pembangunan sebenarnya tidaklah sulit, apabila mahasiswa dapat fokus dan konsentrasi untuk mengikuti perkuliahan. Mata kuliah administrasi pembangunan merupakan mata kuliah konsentrasi di Program Studi Ilmu Administrasi Negara sehingga mengikuti mata kuliah ini dan mendapatkan nilai kelulusan adalah salah satu syarat untuk mengikuti mata kuliah yang lain di program studi.

Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah ini harus dapat diarahkan untuk lebih memahami konsep administrasi pembangunan dan ruang lingkungannya sehingga dengan mudah untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dapat dengan mudah mengikuti mata kuliah administrasi pembangunan merupakan kunci utama untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait di bidang perencanaan pembangunan sehingga menghasilkan lulusan yang berkompeten sebagai administrator.

Konsep administrasi pembangunan lahir adanya keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan dan pengembangan dalam kebutuhan di tatanan bidang kehidupan. Lahirnya ide administrasi pembangunan ini juga disebabkan oleh para pakar ahli administrasi negara, maka mempelajari administrasi pembangunan sangat penting apalagi terkait dengan perubahan dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, dosen yang memberikan materi di perkuliahan mata kuliah administrasi pembangunan harus dapat mengarahkan mahasiswa untuk lebih memahami konsep administrasi pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat.

Perkembangan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah sangat membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli dan berkompeten di bidang perencanaan pembangunan. Program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan bidang kehidupan yang terkait dengan perkembangan dan perubahan tatanan kehidupan.

Kesiapan dalam menghadapi tantangan MEA sangat berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia yang terampil di setiap bidang kehidupan terutama bidang perencanaan pembangunan. Tenaga-tenaga yang sangat dibutuhkan adalah administrator-administrator muda yang terampil sehingga dapat menghadapi tantangan MEA ini dengan mudah, karena awal tahun 2016 ini resmilah Negara Indonesia menjalankan MEA. Menjadi seorang administrator juga tidaklah mudah, karena untuk mendapatkan keahlian di bidang perencanaan pembangunan juga harus memenuhi beberapa syarat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

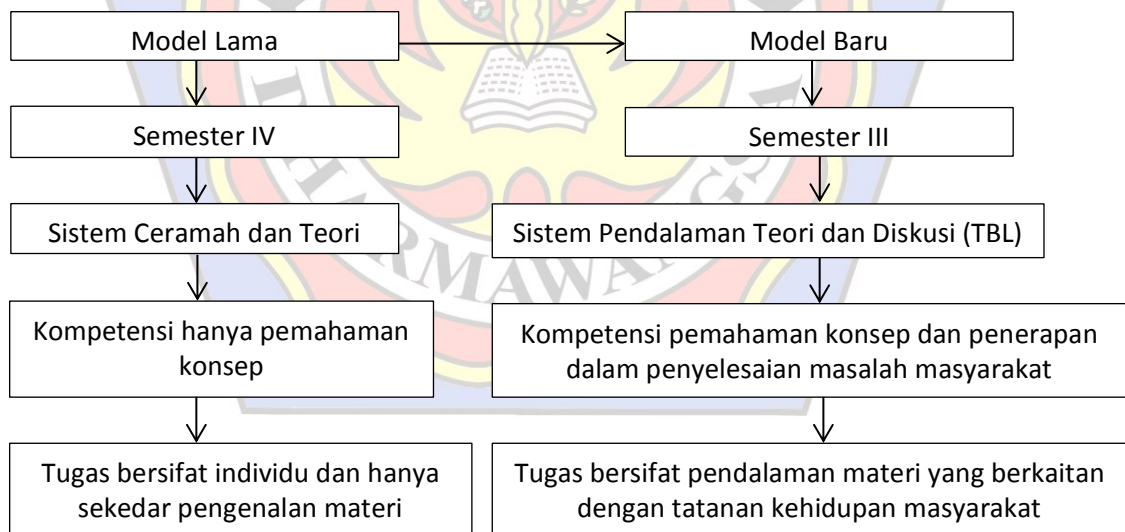
Upaya yang dilakukan untuk menghasilkan lulusan atau SDM yang berkualitas yang andal di bidang perencanaan pembangunan, maka Program Studi Ilmu Administrasi Negara (Prodi IAN) melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2011. Kurikulum ini meliputi 146 SKS, dan salah satu mata kuliah di KBK Tahun 2011 ini adalah mata kuliah administrasi pembangunan. Kompetensi yang diharapkan dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara adalah a) mampu menganalisis secara kritis proses perencanaan, implementasi dan evaluasi program pembangunan dan b) menguasai teknik perencanaan, implementasi dan evaluasi program-program pembangunan, sehingga akhirnya

benar-benar menjadi administrator yang andal di bidang perencanaan pembangunan.

Proses pembelajaran dalam perkuliahan mata kuliah administrasi pembangunan yang bertujuan mewujudkan lingkungan belajar yang interaktif membutuhkan mahasiswa yang aktif serta membutuhkan inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam mengikuti perkuliahan sehingga umpan balik antara peserta didik dan pendidik dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, untuk melaksanakan proses pembelajaran di mata kuliah administrasi pembangunan ini dibutuhkan model pembelajaran yang dapat mendukung mahasiswa sebagai pusat (*student centered*) dalam proses pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator dan motivator (*teaching centered*).

Model mata kuliah administrasi pembangunan yang cocok dapat dilaksanakan dengan metode pembelajaran team based learning (TBL). Adapun model tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini:

Skema 5.1 Model Mata Kuliah Administrasi Pembangunan



Sumber: Hasil Penelitian, Tahun 2015

Skema di atas, menunjukkan bahwa model mata kuliah administrasi pembangunan dapat diperdalam materinya tentang perencanaan pembangunan melalui tugas-tugas yang diberikan. Kemudian, sistem pemberian mata kuliah yang diharapkan dapat lebih berfokus pada sistem pendalaman teori dan diskusi melalui metode *Team Based Learning* (TBL). Selanjutnya didukung dengan tugas yang

berkompeten di bidang perencanaan pembangunan yang fokusnya terhadap pendalaman pemahaman konsep administrasi pembangunan serta penerapan dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat sesuai kebutuhannya.

SIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dianalisis, sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU menghasilkan kompetensi lulusan sebagai administrator yang andal di bidang perencanaan pembangunan, perlu adanya pengembangan model mata kuliah administrasi pembangunan yang berkaitan dengan tatanan kehidupan masyarakat.
2. Model mata kuliah administrasi pembangunan ini mengarah kepada metode pembelajaran yang lebih efektif sehingga mahasiswa dapat lebih memahami konsep administrasi pembangunan di bidang perencanaan pembangunan.
3. Pengembangan model mata kuliah administrasi pembangunan ini juga harus didukung oleh tenaga dosen yang memang ahli dan pakar di bidang perencanaan pembangunan sehingga dalam memberikan materi di perkuliahan mata kuliah administrasi pembangunan dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih fokus dalam mengaplikasikan teori-teori administrasi pembangunan.
4. Buku referensi yang berfokus khusus kepada administrasi pembangunan berdasarkan konsep perencanaan pembangunan sangatlah mendukung untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, direncanakan terbitnya buku ajar mata kuliah administrasi pembangunan. Buku ini bukan hanya untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah administrasi pembangunan, namun bisa juga digunakan untuk mahasiswa yang memilih konsentrasi administrasi pembangunan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pembaruan; Yogyakarta. Direktorat Akademik dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2008. *Buku Panduan Pengembangan KBK*; Jakarta.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI. 2011. *Buku Panduan KKNI*; Jakarta

- Hidayat DKK. 2002. *Pembangunan Partisipatif*, Penerbit YPAPI; Yogyakarta.
- Islamy, Irfan. 2004. *Kebijakan Publik*, Bumi Aksara; Jakarta.
- Kitchen, Ted. 2007. *Skills for Planning Practice*, Palgrave Macmillan: Hampsire
- Majid dan Dian Andayani. 2008. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Remaja Rosdakarya; Bandung.
- Maleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya. Bandung.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Rajawali Pers; Jakarta.
- SK. Ketua Asosiasi Ilmu Administrasi Negara/Publik Indonesia Nomor: 004/KA.IAPA/Kep/KP/2011 Tentang Penetapan Mata Kuliah Inti Nasional dan Gelar Lulusan Pada Program Studi Administrasi Negara/Publik Jenjang S1
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta; Bandung.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Widjajanti, Kesi. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Edisi 12.

